



DAMPAK TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA

Megatrikania Kendali* & Masyithah Aulia Adhiem**

Abstrak

Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen utama produk perikanan di pasar global. Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan dengan nilai ekspor mencapai 31,97 persen dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024. Pada 2 April 2025, Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada sektor perikanan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sektor perikanan di Indonesia, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi dampak kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tarif resiprokal tersebut berisiko menurunkan ekspor perikanan Indonesia, memicu PHK massal, dan mengganggu kesejahteraan nelayan, serta rantai pasok nasional. Dampak tersebut dapat dimitigasi dengan diversifikasi pasar ekspor, peningkatan mutu dan ketertelusuran produk, serta penguatan pasar domestik. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk memperluas hubungan dagang, memperkuat produk dalam negeri, serta memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor perikanan nasional.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi sektor perikanan yang besar, hal ini disebabkan karakteristik geografisnya, di mana dua per tiga wilayahnya merupakan perairan. Produksi perikanan Indonesia pada 2023 tercatat 23,2 juta ton, meningkat dari total volume produksi perikanan tiga tahun sebelumnya. Potensi sumber daya perikanan ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menjadi salah satu produsen utama produk perikanan di pasar global. Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor sektor perikanan tahun 2023 mencapai USD 5,6 miliar. Tiga negara tujuan ekspor terbesar perikanan Indonesia secara berurutan yaitu: China (438.652,86 ton), Amerika Serikat (217.725,02 ton), dan Jepang (113.921,63 ton) (KKP, t.t).

Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal baru sebesar 32 persen untuk Indonesia. Kebijakan ini berdampak salah satunya terhadap sektor perikanan di mana AS adalah negara tujuan utama ekspor produk perikanan dengan nilai ekspor mencapai USD1,90 miliar atau 31,97 persen dari total ekspor perikanan Indonesia di tahun 2024 (Anggela, 2025). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sektor perikanan di Indonesia, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kebijakan tersebut.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: megatrikania.kendali@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id

Dampak Tarif Resiprokal AS terhadap Sektor Perikanan Indonesia

Nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar global sehingga memiliki kaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Peningkatan nilai ekspor berpotensi memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi, seperti nelayan, distributor, eksportir, hingga konsumen. Selain itu juga turut mendorong dinamika perekonomian Indonesia, baik pada skala mikro maupun makro (Khairunisaa, *et al*, 2024). Penyesuaian kebijakan tarif resiprokal AS akan berdampak pada sektor hulu dengan menekan harga dari nelayan agar tetap bisa laku di pasaran (Herin, 2025).

Selain pada nelayan, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pengusaha ikan karena dapat memicu penurunan produksi, gangguan operasional dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut ketua umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan dalam Anggela (2025), beberapa pembeli dari AS telah membatalkan kontrak imbas dari kebijakan tarif resiprokal terbaru. Salah satu pengusaha tuna asal Indonesia menyampaikan bahwa sampai saat ini belum diketahui tarif yang dikenakan terhadap produk tuna dari Indonesia, namun estimasi harga beli tuna dari Indonesia akan berkurang antara 10 sampai 15 persen (Herin, 2025).

Indonesia memiliki produk Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dengan keunggulan komparatif yang tinggi di pasar AS dari tahun 2000—2019. Salah satunya Tuna Maluku yang menjadi primadona pasar perikanan di AS (Hartanto, *et al*, 2021; Herin, 2025). Penerapan kebijakan tarif resiprokal AS dipandang berpotensi dapat menurunkan daya saing ekspor produk perikanan Indonesia di pasar AS dan mendorong importir untuk beralih ke pemasok lain (Grahadyarini, 2025). Komoditas unggulan industri perikanan lainnya yaitu udang dengan volume ekspor udang ke pasar AS tahun 2024 mencapai 135.000 ton, sehingga menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu pilar utama pendapatan bagi petambak udang (KKP, t.t). Meskipun belum ada perhitungan seberapa besar dampak yang ditimbulkan, namun adanya kenaikan tarif impor AS tentu akan berdampak pada petambak udang (Nur, 2025).

Tanpa mitigasi yang efektif, volume ekspor perikanan Indonesia berisiko turun 20-30% dalam waktu 6 hingga 12 bulan ke depan. Kondisi ini berpotensi memicu PHK massal di sektor pengolahan dan ekspor, serta menimbulkan gangguan pada rantai pasok yang melibatkan nelayan, pembudidaya, dan eksportir. Di sisi lain, kelebihan pasokan produk yang tidak terserap pasar domestik dapat menyebabkan penurunan harga dan menambah tekanan bagi para pelaku usaha di sektor ini (Adi, 2025).

Upaya Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Resiprokal AS

Kebijakan tarif resiprokal AS menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mempertahankan posisi strategis produk perikananannya di pasar AS. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah aktif melakukan negosiasi selama masa penangguhan pemberlakuan tarif yang dijadwalkan hingga Juli 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah merumuskan berbagai strategi guna menjaga kestabilan perdagangan ekspor serta mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan domestik (Darwin, 2025).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan, *pertama*, diversifikasi pasar ekspor ke sejumlah negara potensial terus diintensifkan. Kawasan seperti Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Timur Tengah menjadi prioritas dalam perluasan pasar, mengingat tingginya permintaan serta peluang yang terbuka lebar bagi produk perikanan Indonesia, khususnya dalam bentuk olahan bernilai tambah. Tren makanan sehat dan produk laut berkelanjutan banyak diminati banyak negara tujuan ekspor lainnya, dan hal ini bisa menjadi perhatian para pengusaha ikan (Adi, 2025).

Pengalihan pasar ekspor memerlukan penyesuaian terhadap spesifikasi produk serta pemenuhan standar sertifikasi yang ditetapkan oleh negara tujuan. Setiap negara memiliki persyaratan sertifikasi ekspor yang berbeda. Sehingga pengusaha ikan perlu meningkatkan daya tarik produk perikanan dan kelautan dengan mendapatkan sertifikasi internasional yang mengedepankan keberlanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra guna memperoleh akses pasar yang lebih luas (Adi, 2025).

Kedua, diversifikasi pasar perlu disertai dengan peningkatan mutu dan ketertelusuran produk perikanan. Diversifikasi pasar akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan, seperti meningkatnya persaingan dengan negara lain, dampak perubahan iklim, serta masih terbatasnya efektivitas pengelolaan sumber daya. Tantangan dan hambatan ini perlu diatasi melalui kolaborasi dan langkah kebijakan strategis, mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan mutu produk, penciptaan nilai tambah melalui inovasi, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta promosi yang tepat sasaran di pasar internasional (Amri, et al 2024; Khairunisaa, et al, 2024).

Pelabelan seperti *eco-friendly*, *sustainable catch*, atau *organic seafood* berpotensi menjadi nilai tambah yang signifikan, khususnya di pasar yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu keberlanjutan. Di samping itu, penguatan citra merek melalui narasi asal-usul produk (*traceability*) dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai jual serta memperluas daya tarik produk di kancah pasar global (Adi, 2025).

Ketiga, memperkuat pasar domestik sebagai bentuk ketahanan jangka panjang. Dalam hal ini, KKP mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain dengan mengidentifikasi jenis komoditas ikan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, memperbaiki struktur pasar, menjamin ketersediaan serta mutu hasil perikanan, serta memastikan kelancaran distribusi produk perikanan hingga ke konsumen (Darwin, 2025; Santia, 2025). Bagi pengusaha ikan, penyesuaian skala dan produk perlu dipertimbangkan untuk pasar domestik. UMKM di sektor perikanan dapat berinovasi dengan mengalihkan sebagian produksi menjadi produk olahan domestik.

Adaptasi sektor perikanan secara cepat terhadap perubahan ini dapat berpeluang mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat kemandirian sektor perikanan. Di tengah ketidakpastian global, besarnya potensi pertumbuhan industri perikanan Indonesia sangat bergantung pada adaptabilitas, diversifikasi pasar, serta peningkatan kualitas dan inovasi

produk (Adi, 2025). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi kunci untuk mempercepat transformasi sektor perikanan melalui investasi teknologi, penguatan logistik, dan pengembangan produk bernilai tambah.

Penutup

Kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen berpotensi menurunkan daya saing ekspor perikanan Indonesia, khususnya pada komoditas udang dan tuna. Dampak kebijakan ini dirasakan oleh nelayan hingga pengusaha ikan nasional, dengan risiko terjadinya penurunan produksi hingga pemutusan kontrak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS selagi menunggu proses negosiasi, *pertama*, diversifikasi pasar ekspor ke sejumlah negara potensial lain. *Kedua*, peningkatan mutu dan ketertelusuran produk perikanan. *Ketiga*, memperkuat produk perikanan dan kelautan pada pasar domestik.

Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar pada produk perikanan dan kelautan dengan cara memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain. Selain itu, Komisi IV DPR RI perlu mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat produk perikanan dan kelautan pada pasar domestik.

Referensi

- Adi, C. P. (2025, April 9). Strategi bertahan industri perikanan di tengah ketidakpastian global. *Antara News* <https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/4759609/strategi-bertahan-industri-perikanan-di-tengah-ketidakpastian-global>
- Amri, M. I., Tahir, R., Haris, A., Agusanty, H., & Saleh, M. S. (2024). Tren ekspor perikanan Indonesia. *Journal of Fisheries and Marine Science*, 8(1), 44-62.
- Anggela, N. L. (2025, April 9). Tarif Trump ancam industri perikanan, ekspor ke AS terlalu dominan. *Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250409/12/1867725/tarif-trump-ancam-industri-perikanan-ekspor-ke-as-terlalu-dominan>
- Darwin, D. I. (2025, April 15). Tarif Trump dan jalan ganda perikanan Indonesia. *Detik.com*. <https://news.detik.com/kolom/d-7870144/tarif-trump-dan-jalan-ganda-perikanan-indonesia>.
- Grahadyarini, B. M. (2025, April 10). Industri perikanan garap peluang diversifikasi pasar. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/industri-perikanan-garap-peluang-diversifikasi-pasar>
- Hartanto, T. R., Suharto, & Burhanuddin. (2021). Daya saing ekspor ikan Tuna-Cakalang-Tongkol Indonesia di pasar Amerika Serikat. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 24(2), 227-235.
- Herin, F. P. (2025, April 5). Nasib nelayan Tuna Indonesia di bawah tekanan tarif Trump. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/trump-naikan-tarif-buyer-as-beri-bocoran-harga-tuna-ke-nelayan-indonesia>
- Indonesia, K. K. (2025, April 21). Data statistik ekspor impor KP..kkp.go.id/portals/data-statistik/exim/tbl-statis
- Khairunisaa, S. S., Putri, A. A., & Sari, D. S. (2024). Blue economy sebagai basis strategi kebijakan ekspor industri perikanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 6(2), 141-161.

- Nur, V. P. (2025, April 14). Undang jadi komoditas utama ekspor sektor perikanan, akan terdampak tarif resiprokal. *Kontan*. <https://industri.kontan.co.id/news/undang-jadi-komoditas-utama-ekspor-sektor-perikanan-akan-terdampak-tarif-resiprokal>
- Santia, T. (2025, April 9). Ekspor perikanan RI terancam imbas tarif Trump, Menteri KKP: Indonesia tak boleh kalah dari Vietnam. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5989487/ekspor-perikanan-ri-terancam-imbastarif-trump-menteri-kkp-indonesia-tak-boleh-kalah-dari-vietnam>

